BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya pembangunan Jalan Senayan Lamusung, beberapa masyarakat desa, termasuk Asmini, yang menyetujui pengadaan tanah, dirasa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang ada dan kompensasi yang diberikan sudah cukup baik. Jalan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam aktivitas sehari-hari serta memajukan desa untuk kepentingan bersama. Di sisi lain, masyarakat yang tidak setuju dan enggan melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, terutama dengan adanya provokator yang ikut campur. Namun, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah terus melakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menghindari konflik dan penolakan terhadap pembebasan lahan.
2. Para pemilik hak atas tanah dilindungi secara hukum jika terjadi ketidaksepakatan tentang besaran kompensasi. Masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat setempat seperti Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri Dalam Negeri. Mereka dapat menjelaskan alasan keberatan mereka. Mereka hanya dapat menyuarakan keberatan terhadap jumlah kompensasi yang ditawarkan, bukan terhadap penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh

karena itu, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah mereka. Jika ada Masyarakat yang enggan melepas tanahnya untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, pemerintah akan melakukan upaya untuk mengambil alih tanah itu dengan memberi imbalan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri terdekat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan transparan, memastikan bahwa pemilik tanah yang terpengaruh oleh pengadaan tanah mereka akan menerima ganti rugi yang cukup dan layak, termasuk nilai tanah dan penggantian atas kerugian yang bisa saja terjadi. Selain itu, penting juga agar proses pengambilan tanah untuk kepentingan umum mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial, serta mengambil langkah perbaikan jika diperlukan untuk mengurangi dampak negatif.

2. Bagi Masyarakat

Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak terkait proses pengambilan tanah untuk kepentingan umum harus melibatkan mereka untuk mengawasi bagaimana prosesnya berjalan dan efek yang ditimbulkannya, memberikan pelatihan mengenai hak-hak dalam proses hukum terkait pengadaan tanah, serta cara efektif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kerja sama dengan pemerintah perlu diperkuat untuk

mengawasi dan memastikan bahwa proses pengadaan tanah berlangsung secara adil dan transparan, serta menyampaikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki proses yang ada.

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA